

Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keuangan: Bukti Baru dari Negara-Negara Berkembang

Ringkasan

Tulisan ini merangkum diskusi dalam acara *Dinamika Kependudukan* yang diselenggarakan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Program Magister Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada tanggal 8 April 2026. Alicia Girón, Direktur Program Studi Universitas untuk Asia, Afrika, dan Oseania di National Autonomous University of Mexico, mempresentasikan makalahnya yang berjudul: “Gender Equality and Financial and Economic Well-Being: New Evidence from Emerging Economies, A Blueprint for CSW70 & SDG5”. Kesetaraan gender merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan, namun ketimpangan struktural yang persisten masih membatasi kesejahteraan ekonomi dan keuangan perempuan di negara-negara berkembang. Artikel ini mengkaji hubungan antara ketimpangan gender, finansialisasi, dan transformasi digital, dengan menyoroti keterbatasan pendekatan kebijakan saat ini. Sistem keuangan, kebijakan makroekonomi, dan infrastruktur digital sering kali justru memperkuat ketimpangan gender bukan mengurangi. Artikel ini juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap kerja perawatan tidak berbayar (*unpaid care work*), kesenjangan digital terhadap gender, serta penguatan peran negara dalam mendorong pembangunan inklusif. Rekomendasi kebijakan disusun selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 5) dan agenda *Commission on the Status of Women* (CSW70).

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender diakui secara luas sebagai hak asasi manusia yang fundamental sekaligus pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam akses pendidikan dan kesehatan, kesenjangan gender masih terlihat dalam pasar tenaga kerja, inklusi keuangan, dan akses terhadap peluang ekonomi, khususnya di negara berkembang.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu atau budaya, tetapi tertanam dalam struktur ekonomi modern. Salah satu faktor kunci adalah meningkatnya finansialisasi, yaitu dominasi sektor keuangan dalam perekonomian. Finansialisasi telah mengubah sistem ekonomi dengan cara yang sering kali memperparah ketimpangan (Girón, 2026). Di sisi lain, transformasi digital membuka peluang baru, namun juga menciptakan bentuk eksklusi baru bagi perempuan.

Tulisan ini mengeksplorasi hubungan antara kesetaraan gender dan kesejahteraan finansial serta ekonomi, dengan fokus pada negara-negara berkembang. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah

untuk (a) menganalisis faktor-faktor struktural yang mendorong ketimpangan gender, (b) menganalisis peran sistem keuangan dan digital dalam membentuk hasil, dan (c) merekomendasikan kebijakan yang selaras dengan SDG 5¹ dan agenda CSW70².

KERANGKA TEORETIS: FINANSIALISASI DAN REPRODUKSI SOSIAL

Konsep finansialisasi memberikan cara pandang yang berguna untuk memahami ketimpangan ekonomi kontemporer. Finansialisasi merujuk pada semakin besarnya pengaruh aktor, pasar, dan motif keuangan dalam membentuk hasil-hasil ekonomi. Meskipun proses ini telah memfasilitasi mobilitas modal dan inovasi

1. SDG 5 adalah salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals yang berfokus pada mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender bukan hanya isu keadilan, tetapi juga kunci untuk: pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

2. CSW70 adalah singkatan dari *Commission on the Status of Women* sesi ke-70, yaitu pertemuan tahunan ke-70 dari Commission on the Status of Women yang diselenggarakan oleh PBB. CSW merupakan forum global utama di bawah PBB yang membahas isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keuangan: Bukti Baru dari Negara-Negara Berkembang

keuangan, finansialisasi juga berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi.

Girón (2026) berpendapat bahwa finansialisasi beroperasi sebagai mekanisme ekstraksi (*extraction mechanism*), yang mendistribusikan kembali kekayaan dari tenaga kerja ke modal dan secara tidak proporsional berdampak pada kelompok rentan, termasuk perempuan. Perempuan sering kali lebih banyak terkonsentrasi di sektor berpenghasilan rendah dan sektor informal, sehingga lebih rentan terhadap guncangan keuangan.

Konsep yang berkaitan erat dengan hal ini adalah reproduksi sosial (*social reproduction*), yang mencakup kerja tidak dibayar dan kerja dengan upah rendah yang diperlukan untuk menopang rumah tangga dan komunitas. Hal ini meliputi perawatan/pengasuhan, pekerjaan domestik, dan bentuk-bentuk kerja lain yang esensial bagi fungsinya perekonomian, namun sering kali tidak tercakup dalam analisis ekonomi formal. Kebijakan moneter dan fiskal kerap mengabaikan dimensi ini, sehingga menimbulkan bias gender yang memperkuat ketimpangan (Girón, 2026).

INKLUSI KEUANGAN DAN KESENJANGAN GENDER

Inklusi keuangan sering dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, bukti menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih signifikan. Perempuan cenderung memiliki akses lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki terhadap rekening bank, kredit, dan layanan keuangan formal lainnya. Hambatan struktural seperti kurangnya agunan, diskriminasi, dan rendahnya literasi keuangan menjadi faktor utama (Girón, 2026).

Selain itu, fenomena “mikro-finansialisasi kemiskinan” menunjukkan bahwa integrasi kelompok miskin ke dalam sistem keuangan sering terjadi karena kebutuhan rumah tangga dengan melakukan pinjaman/utang, bukan

pemberdayaan. Hal ini berpotensi menciptakan jebakan utang bagi perempuan (Girón, 2026).

KESENJANGAN DIGITAL GENDER

Teknologi digital telah mentransformasi sistem keuangan dan partisipasi ekonomi di dunia. Layanan perbankan *mobile*, pembayaran digital, dan inovasi *fintech* memiliki potensi dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan serta menurunkan biaya transaksi. Namun, manfaat digitalisasi tidak terdistribusi secara merata.

Kesenjangan digital gender masih menjadi hambatan yang signifikan. Perempuan memiliki kemungkinan lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam mengakses perangkat digital, konektivitas internet, dan keterampilan digital. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan digital dan memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi (Girón, 2026).

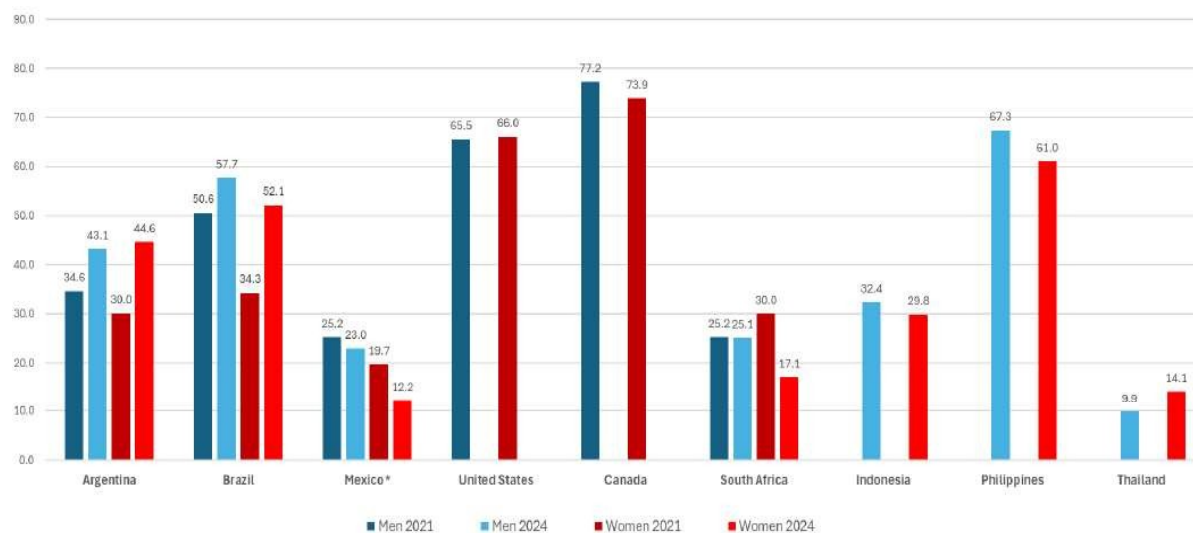
Data dari negara-negara berkembang menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten tertinggal dibandingkan laki-laki dalam penggunaan pembayaran *mobile* dan layanan keuangan digital. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan STEM dan TIK, yang membatasi akses mereka terhadap peluang kerja bernilai tinggi di ekonomi digital (Girón, 2026).

Transformasi digital telah mengubah sistem keuangan dan ekonomi. Teknologi seperti *mobile banking* dan pembayaran digital membuka akses baru, tetapi manfaatnya belum merata. Perempuan masih tertinggal dalam akses terhadap perangkat digital, internet, dan keterampilan teknologi. Hal ini membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi digital (Girón, 2026). Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan STEM dan ICT membatasi akses mereka terhadap pekerjaan bernilai tinggi di masa depan.

Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keuangan: Bukti Baru dari Negara-Negara Berkembang

Gambar 1

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang mengakses pembayaran via kartu debit/kredit atau hand phone, menurut gender, 2021 and 2024, di beberapa negara



Sumber: Gender Statistics, World Bank dikompilasi Giron (2026)

PEKERJAAN PERAWATAN TIDAK DIBAYAR (*UPAID CARE WORKERS*) DAN KETIMPANGAN EKONOMI

Pekerjaan perawatan tidak dibayar merupakan komponen penting namun sering terabaikan dalam ketimpangan gender. Perempuan menjalankan porsi yang tidak proporsional dalam tanggung jawab domestik dan pengasuhan, yang membatasi partisipasi mereka dalam pekerjaan berbayar serta mengurangi kemandirian ekonomi mereka.

Ketidakseimbangan ini memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan. Hal ini membatasi pasokan tenaga kerja, menurunkan produktivitas, dan memperkuat ketimpangan pendapatan. Meskipun sangat penting, pekerjaan perawatan tidak dibayar jarang diperhitungkan dalam indikator ekonomi nasional maupun kerangka kebijakan.

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kombinasi antara investasi publik dan reformasi kebijakan. Perluasan akses terhadap layanan pengasuhan anak, layanan kesehatan, dan layanan sosial dapat mengurangi

beban perempuan serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pasar tenaga kerja. Pada saat yang sama, kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan serta pembagian tanggung jawab yang lebih adil menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender (Girón, 2026).

DINAMIKA REGIONAL DAN PERSPEKTIF KOMPARATIF

Ketimpangan gender di negara-negara berkembang perlu dipahami dalam konteks global yang lebih luas. Perbedaan kapasitas kelembagaan, struktur ekonomi, dan lintasan historis memengaruhi hasil yang dicapai di berbagai wilayah.

Analisis komparatif menunjukkan adanya kemajuan sekaligus tantangan yang masih bertahan. Meskipun beberapa negara telah mencapai peningkatan signifikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kesenjangan dalam partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik masih tetap ada. Indeks Kesenjangan Gender Global

Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keuangan: Bukti Baru dari Negara-Negara Berkembang

(2025) menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator, namun ketimpangan ekonomi masih menjadi perhatian utama (Girón, 2026).

Kerja sama regional dan model pembangunan alternatif, khususnya di antara negara-negara *Global South*, menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan bersama. Namun, upaya ini memerlukan kerangka kelembagaan yang kuat serta komitmen politik yang tinggi.

Kebijakan makroekonomi harus responsif gender, termasuk dalam penganggaran dan regulasi sektor keuangan. Negara juga perlu memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi.

Intervensi kebijakan sebaiknya berfokus pada:

- memperluas sistem keuangan inklusif yang memenuhi kebutuhan spesifik perempuan,
- menjembatani kesenjangan digital melalui pembangunan infrastruktur dan pendidikan,

Gambar 2
Indeks Kesenjangan Gender Global, di Beberapa Negara, 2006, 2020, 2025

	Mexico			Argentina			Brazil		
	2006	2020	2025	2006	2020	2025	2006	2020	2025
Score*	0.646	0.754	0.776	0.683	0.746	0.762	0.654	0.691	0.72
Global Ranking**	75	25	23	41	30	37	67	92	72
Participation and Economic Opportunities	0.480	0.574	0.609	0.551	0.623	0.666	0.604	0.653	0.662
Educational level	0.992	0.997	0.993	0.997	0.995	1.000	0.972	1.000	1.000
Health and Survival	0.980	0.979	0.980	0.980	0.980	0.974	0.980	0.980	0.977
Political empowerment	0.133	0.468	0.522	0.204	0.387	0.409	0.061	0.133	0.240

	Mexico			United States			Canada		
	2006	2020	2025	2006	2020	2025	2006	2020	2025
Score*	0.646	0.754	0.776	0.704	0.724	0.756	0.716	0.772	0.767
Global Ranking**	75	25	23	23	53	42	14	19	32
Participation and Economic Opportunities	0.480	0.574	0.609	0.759	0.756	0.762	0.730	0.751	0.751
Educational level	0.992	0.997	0.993	0.982	1.000	1.000	0.999	1.000	1.000
Health and Survival	0.980	0.979	0.980	0.980	0.976	0.973	0.978	0.971	0.969
Political empowerment	0.133	0.468	0.522	0.097	0.164	0.291	0.159	0.365	0.350

Sumber: The World Economic Forum's "The Global Gender Gap Reports 2006, 2020, 2025 dikompilasi oleh Giron (2026)

PERAN NEGARA DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesetaraan gender tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme pasar. Negara harus memainkan peran aktif dalam mengatasi ketimpangan struktural.

- mengakui dan mengurangi pekerjaan perawatan yang tidak dibayar,
- mendorong pekerjaan yang layak dan kesempatan yang setara di pasar tenaga kerja, dan
- memperkuat mekanisme tata kelola dan akuntabilitas

Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Ekonomi dan Keuangan: Bukti Baru dari Negara-Negara Berkembang

Langkah-langkah ini sejalan dengan SDG 5 dan agenda CSW70.

IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Bagi negara seperti Indonesia, temuan studi ini sangat relevan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan transformasi digital telah menciptakan peluang baru, namun kesenjangan gender masih tetap signifikan.

Kebijakan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam strategi inklusi keuangan dan digital menjadi sangat penting. Hal ini mencakup dukungan terhadap usaha yang dijalankan oleh perempuan, peningkatan literasi keuangan, serta memastikan akses yang setara terhadap teknologi digital—terutama bagi perempuan yang terlibat dalam usaha mikro dan kecil.

Pada saat yang sama, mengatasi hambatan struktural—seperti pekerjaan perawatan tidak dibayar dan ketimpangan di pasar tenaga kerja—tetap menjadi masalah yang krusial. Diperlukan upaya yang terkoordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan (pusat dan daerah) untuk mencapai kemajuan yang berarti. Pengesahan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh DPR pada 21 April 2026 merupakan tonggak penting dalam melindungi perempuan terutama yang bekerja sebagai pekerja domestik.

Bagi Indonesia, temuan ini sangat relevan. Meskipun inklusi keuangan dan digital berkembang pesat, kesenjangan gender masih ada.

Transformasi digital memberikan peluang besar, tetapi tanpa kebijakan yang inklusif, dapat memperbesar ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung perempuan dalam akses keuangan, literasi digital, dan kewirausahaan. Selain itu, isu struktural seperti kerja tidak berbayar dan ketimpangan pasar kerja harus menjadi prioritas.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender merupakan prasyarat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan yang ada bersifat struktural dan memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif.

Integrasi antara inklusi keuangan, transformasi digital, dan kebijakan sosial menjadi kunci. Negara harus berperan aktif dalam memastikan bahwa sistem ekonomi bekerja untuk semua.

Dalam konteks menuju CSW70 dan SDG 5, diperlukan tindakan yang lebih berani dan transformatif untuk mewujudkan kesetaraan gender secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Girón, A. (2026). *Gender Equality and Financial and Economic Well-Being: New Evidence from Emerging Economies—A Blueprint for CSW70 & SDG5*. National Autonomous University of Mexico.

World Economic Forum. (2025). *Global Gender Gap Report 2025*.

World Bank. (2022). *Gender Statistics Database*.

Penulis

Nur Hadi Wiyono

(Lembaga Demografi, FEB, Universitas Indonesia)

Editor

Ratna Indrayanti

(Lembaga Demografi FEB, Universitas Indonesia)

LEMBAGA DEMOGRAFI

Nathanael Iskandar Building Building 2nd and 3rd
Faculty of Economics and Business
University of Indonesia, DEPOK 16424



TLP : +62 21 787 2911

FAX : +62 787 2909



Info@ldfeui.org



@ldfeui_



@ldfeui



Lembaga Demografi FEB UI



www.ldfeui.org